BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan uraian mengenai Analisis Penyelenggaraan Ibadah Haji: Studi Pelaksanaan Kebijakan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Surabaya Tahun 2016, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh Kementerian Agama Kota Surabaya adalah dengan menggunakan kebijakan struktural pemerintah pusat berupa Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Ibadah Haji. Sedangkan kebijakan kultural untuk memperlancar pelaksanaan teknis antara lain dengan membuat grup media sosial dan bekerjasama dengan pers guna penyaluran informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ibadah Haji secara maksimal.
2. Analisis kebijakan publik dalam pelaksanaan haji di Kementerian Agama Kota Surabaya bahwa pelaksanaan kebijakan yang dilakukan telah sesuai prosedur, yakni mengikuti perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan lainnya. Dalam pelayanan Kementerian Agama Surabaya telah bekerja sama dengan banyak pihak agar ibadah haji berjalan dengan lancar, namun koordinasi secara intens dan mendalam dengan banyak pihak perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini sangatlah terbatas, sehingga perlu untuk terus dilakukan perbaikan dan terus diadakan penelitian dalam haji, sehingga hazanah keilmuan tentang haji bisa dipelajari secara utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id